

## Pendidikan Perempuan dan Otoritas Keagamaan dalam Pemikiran Zainab al-Ghazali dan Khairiyah Hasyim

Kholil Chusyairi<sup>\*1</sup>, Siti Kasmila<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; chusyairikhohil@gmail.com, <sup>2</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung; siti.kasmila@uinsgd.ac.id

\*Penulis Korespondensi

Artikel Dikirim: 4 Juni 2024

Artikel Diterima: 30 Desember 2025

Artikel Dipublikasikan: 31 Desember 2025

**Abstrak:** Kajian mengenai peran perempuan dalam pendidikan Islam sering kali masih diposisikan secara deskriptif dan normatif, tanpa analisis gender yang memadai. Artikel ini bertujuan menganalisis peran dan kontribusi tokoh perempuan dalam pengembangan pendidikan agama Islam melalui perspektif feminisme Islam, dengan menelaah pemikiran dan praktik pendidikan Zainab al-Ghazali dan Khairiyah Hasyim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur kritis, dianalisis secara komparatif dan interpretatif terhadap karya, biografi, serta praktik sosial-keagamaan kedua tokoh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Zainab al-Ghazali merepresentasikan model pemberdayaan perempuan berbasis aktivisme dan gerakan sosial-keagamaan yang menegaskan peran perempuan sebagai agen perubahan dalam ruang publik Islam, sementara Khairiyah Hasyim mengembangkan model pendidikan perempuan berbasis institusional melalui pesantren dan madrasah sebagai ruang pembentukan intelektual dan moral perempuan Muslim. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan Islam bagi perempuan tidak hanya berfungsi sebagai transmisi pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai strategi transformasi sosial berbasis kesetaraan gender dalam kerangka nilai-nilai Islam. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian feminisme Islam dalam pendidikan agama Islam dengan menghadirkan tipologi peran perempuan Muslim dalam konteks sosial dan kultural yang berbeda.

**Kata Kunci:** Faminisme Islam, Pendidikan Agama Islam, Perempuan Muslim, Zainab al-Ghazali, dan Khairiyah Hasyim.

**Abstract:** *Studies on the role of women in Islamic education have often remained descriptive and normative, with limited engagement in gender-based analysis. This article aims to examine the role and contributions of female figures in the development of Islamic religious education through the perspective of Islamic feminism, focusing on the educational thought and practices of Zainab al-Ghazali and Khairiyah Hasyim. This study employs a qualitative approach using a critical literature review method, analyzed through comparative and interpretative frameworks applied to primary texts, biographical sources, and socio-religious practices of both figures. The findings reveal that Zainab al-Ghazali represents a model of women's empowerment grounded in religious activism and socio-political movements, positioning Muslim women as agents of change within the public sphere of Islam. In contrast, Khairiyah Hasyim developed an institutional-based model of women's education through pesantren and madrasah as spaces for intellectual and moral formation of Muslim women. These findings indicate that Islamic education for women functions not merely as the transmission of religious knowledge, but also as a strategy for social transformation rooted in gender equality within the framework of Islamic values. Theoretically, this study contributes to the discourse on Islamic feminism in Islamic education by proposing a typology of Muslim women's roles across different socio-cultural contexts.*

**Keywords:** *Islamic feminism; Islamic religious education; Muslim women; Zainab al-Ghazali; Khairiyah Hasyim.*

## 1. Pendahuluan

Pendidikan Islam merupakan instrumen strategis dalam pembentukan kepribadian, moral, dan kapasitas intelektual manusia sepanjang hayat. Dalam perkembangannya, kajian pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek kurikulum dan metode pembelajaran, tetapi juga pada relasi kuasa dan konstruksi sosial yang memengaruhi akses serta peran subjek pendidikan, termasuk perempuan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa meskipun Islam secara normatif menegaskan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan, praktik sosial-keagamaan masih kerap mereproduksi marginalisasi perempuan dalam otoritas pendidikan dan keagamaan (Wadud, 2006).

Dalam konteks pendidikan Islam, perempuan sering diposisikan secara domestik dan simbolik sebagai pendukung, bukan sebagai subjek aktif dalam produksi dan transmisi pengetahuan keagamaan (Tanjung et al., 2021). Kondisi ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh ajaran Islam, melainkan oleh konstruksi tafsir patriarkal dan struktur sosial yang membatasi partisipasi perempuan dalam ruang publik keagamaan. Padahal, secara historis Islam telah memberikan legitimasi teologis terhadap hak-hak perempuan, termasuk hak atas pendidikan, kepemilikan, dan partisipasi sosial (Hanapi, 2015). Oleh karena itu, kajian tentang perempuan dalam pendidikan Islam perlu diarahkan pada analisis kritis terhadap peran, kontribusi, dan strategi pemberdayaan perempuan dalam berbagai konteks sosial dan kultural.

Sejumlah penelitian tentang perempuan dan pendidikan Islam umumnya masih bersifat normatif-teologis atau deskriptif-historis, dengan menekankan legitimasi teks keagamaan atau biografi tokoh perempuan secara terpisah. Namun demikian, kajian yang secara analitis dan komparatif mengkaji model pemberdayaan pendidikan perempuan yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh perempuan Muslim dalam konteks sosial yang berbeda masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian yang mempertemukan figur perempuan Muslim dari Timur Tengah dan Indonesia dalam satu kerangka analisis pendidikan Islam berbasis perspektif feminisme Islam juga belum banyak dilakukan (Abidin, 2017).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini memfokuskan kajian pada pemikiran dan praktik pendidikan perempuan yang dikembangkan oleh Zainab al-Ghazali dan Khairiyah Hasyim. Kedua tokoh ini merepresentasikan konteks sosial dan kultural yang berbeda, namun sama-sama menempatkan pendidikan sebagai sarana strategis pemberdayaan perempuan Muslim. Artikel ini mengajukan pertanyaan utama mengenai bagaimana konsep dan praktik pendidikan perempuan yang dikembangkan oleh kedua tokoh tersebut, bagaimana peran

mereka dalam memberdayakan perempuan melalui pendidikan Islam ditinjau dari perspektif feminisme Islam, serta apa persamaan dan perbedaan model pemberdayaan pendidikan perempuan yang mereka tawarkan.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pemikiran dan praktik pendidikan perempuan Zainab al-Ghazali dan Khairiyah Hasyim melalui perspektif feminisme Islam. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian feminisme Islam dalam bidang pendidikan agama Islam dengan menghadirkan tipologi peran perempuan Muslim sebagai agen transformasi sosial dalam konteks yang berbeda. Secara praktis, artikel ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan pendidikan Islam yang lebih inklusif dan berkeadilan gender, tanpa meninggalkan kerangka nilai-nilai keislaman.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang dianalisis secara komparatif dan kritis (Sugiono, 2012). Fokus penelitian diarahkan pada pemikiran dan praksis pendidikan perempuan yang dikembangkan oleh Zainab al-Ghazali dan Khairiyah Hasyim dalam konteks sosial, kultural, dan keagamaan yang berbeda. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya bersifat studi tokoh, tetapi juga merupakan studi komparatif berbasis analisis gender dalam pendidikan Islam.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya Zainab al-Ghazali, biografi resmi, tulisan, serta dokumentasi aktivitas sosial-keagamaannya, serta sumber-sumber historis dan tulisan yang merekam pemikiran dan praktik pendidikan Khairiyah Hasyim. Sumber sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pendidikan Islam, perempuan, dan kajian gender. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan kriteria: (1) relevansi dengan tema pendidikan perempuan dan Islam, (2) kredibilitas akademik penulis dan penerbit, serta (3) kontribusi teoretis terhadap diskursus gender dan pendidikan Islam.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, data diklasifikasikan berdasarkan tema utama, yaitu konsep pendidikan perempuan, peran sosial-keagamaan perempuan, dan strategi pemberdayaan melalui pendidikan. Kedua, dilakukan analisis interpretatif terhadap pemikiran dan praktik kedua tokoh dengan menggunakan pendekatan analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan model pendidikan perempuan yang mereka kembangkan. Ketiga, hasil analisis tersebut dibaca secara kritis melalui kerangka teoritis feminisme Islam dan kajian gender dalam Islam.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran feminisme Islam yang dikembangkan oleh Amina Wadud, Asma Barlas, Siti Musdah Mulia,

dan Husein Muhammad, khususnya terkait relasi gender, otoritas keagamaan, dan pendidikan Islam. Dalam kerangka ini, istilah “feminisme Islam” tidak dipahami sebagai keseragaman ideologis, melainkan sebagai spektrum pemikiran kritis yang menempatkan keadilan gender dalam bingkai nilai-nilai Islam (Sukmadinata, 2006). Oleh karena itu, penyebutan Zainab al-Ghazali dalam kajian ini tidak dimaksudkan untuk mengafirmasi posisinya sebagai feminis liberal, melainkan untuk membaca secara kritis kontribusinya dalam pemberdayaan perempuan Muslim melalui aktivisme keagamaan, dengan tetap memperhatikan ketegangan ideologis antara feminisme Islam dan sikap kritisnya terhadap feminisme Barat. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual mengenai peran perempuan Muslim dalam pendidikan Islam, serta menghindari generalisasi normatif dan deskriptif yang sering muncul dalam kajian perempuan dan Islam.

### **3. Hasil Penelitian**

#### **3.1 Konsep Pendidikan Perempuan Menurut Zainab al-Ghazali dalam Analisis Kritis**

Pemikiran Zainab al-Ghazali tentang pendidikan perempuan tidak dapat dilepaskan dari konteks aktivisme Islam di Mesir pada pertengahan abad ke-20, sebuah periode yang ditandai oleh ketegangan antara kolonialisme, nasionalisme sekuler, dan kebangkitan gerakan Islam. Zainab al-Ghazali (1917–2005) adalah pendiri *Jama'at al-Sayyidat al-Muslimat* (Perhimpunan Muslimah) dan dikenal luas melalui autobiografinya *Ayyām min Ḥayātī* (Hari-hari dalam Hidupku), yang menggambarkan pengalaman perjuangannya dalam gerakan Islam (al-Ghazali, 1994). Latar belakang pendidikannya yang kuat dalam tradisi al-Azhar, serta keterlibatannya dengan Ikhwanul Muslimin, membentuk kerangka ideologis pandangannya tentang perempuan, pendidikan, dan dakwah. Dalam konteks ini, pendidikan perempuan dipahami Zainab bukan sekadar sebagai aktivitas pedagogis, melainkan sebagai strategi ideologis untuk membangun kesadaran keagamaan (*religious consciousness*) yang kritis dan berorientasi pada aksi. Pendidikan berfungsi sebagai medium internalisasi nilai-nilai Islam yang bertujuan membentuk subjek perempuan Muslim yang memiliki keteguhan moral, kesadaran dakwah, serta kesiapan berpartisipasi dalam perjuangan sosial-keagamaan. Dengan demikian, pendidikan tidak dimaknai semata sebagai transmisi pengetahuan keagamaan formal, tetapi sebagai proses ideologisasi yang membangun militansi etis dan komitmen kolektif terhadap misi dakwah Islam.

Berbeda dengan pendekatan feminisme liberal yang menekankan kesetaraan struktural dan hak individual secara universal, Zainab al-Ghazali memposisikan pendidikan perempuan sebagai kewajiban keagamaan yang terikat pada misi kolektif umat (*ummah*) (Adnan &

Ahmad, Z, 2009). Dalam kerangka ini, pendidikan diarahkan untuk menyiapkan perempuan sebagai pendidik generasi, pendakwah, dan penggerak sosial Islam yang berperan aktif dalam transformasi masyarakat. Orientasi tersebut menunjukkan bahwa Zainab menempatkan pendidikan perempuan dalam relasi fungsional dengan proyek Islamisasi masyarakat, di mana emansipasi perempuan tidak dimaknai sebagai pelepasan dari norma-norma keagamaan, melainkan sebagai penguatan peran perempuan dalam batas-batas normativitas Islam. Posisi ini memperlihatkan ketegangan ideologis antara pemberdayaan perempuan dan kritik terhadap feminisme liberal, sekaligus menegaskan karakter khas pemikiran Zainab al-Ghazali dalam wacana feminisme Islam yang bersifat kontekstual dan berbasis nilai religious (Kurniawati, 2023) (Ibrahim, 2011).

### **3.2 Otoritas Keagamaan Perempuan dalam Konteks Mesir**

Dalam konteks sosial Mesir yang didominasi oleh struktur otoritas keagamaan maskulin dan terinstitusionalisasi, Zainab al-Ghazali menghadirkan model otoritas keagamaan perempuan yang bersifat non-institusional namun memiliki daya pengaruh yang signifikan. Otoritas tersebut tidak dibangun melalui legitimasi formal lembaga keulamaan seperti al-Azhar, melainkan melalui penguasaan ilmu-ilmu keislaman, konsistensi praksis keagamaan, aktivitas dakwah, serta produksi wacana keislaman melalui tulisan dan ceramah. Model otoritas ini menunjukkan bahwa perempuan Muslim dapat memperoleh pengakuan keagamaan melalui kapasitas intelektual dan integritas moral, meskipun berada di luar struktur resmi otoritas keagamaan. Dalam perspektif ini, Zainab al-Ghazali merepresentasikan bentuk otoritas simbolik dan moral yang beroperasi secara paralel dengan institusi keulamaan formal, sekaligus menantang asumsi bahwa otoritas keagamaan hanya dapat dimiliki oleh laki-laki. Namun demikian, konstruksi otoritas keagamaan yang dikembangkan Zainab al-Ghazali tidak dapat dilepaskan dari sikap kritisnya terhadap feminisme Barat dan agenda kesetaraan gender liberal. Zainab menolak pemaknaan emansipasi perempuan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai syariat, dan menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan harus berakar pada ajaran Islam. Dalam kerangka feminisme Islam sebagaimana dirumuskan oleh Amina Wadud dan Asma Barlas, posisi Zainab dapat dibaca sebagai bentuk *Islamic agency* perempuan, yakni kapasitas perempuan Muslim untuk bertindak, bernegosiasi, dan memperoleh otoritas dalam batas-batas normativitas keagamaan (Barlas, 2002). Ketegangan antara pemberdayaan perempuan dan resistensi terhadap feminisme liberal ini menunjukkan bahwa feminisme Islam bukanlah wacana yang homogen, melainkan spektrum pemikiran yang merefleksikan dinamika sosial, politik, dan keagamaan di konteks lokal Mesir.

### **3.3 Konsep Pendidikan Perempuan Perspektif Khairiyah Hasyim**

Berbeda dengan Zainab al-Ghazali yang menekankan aktivisme sosial-keagamaan sebagai medium pemberdayaan perempuan, Khairiyah Hasyim mengembangkan pendidikan perempuan melalui pendekatan institusional yang berorientasi pada keberlanjutan. Pendidikan perempuan diwujudkan secara konkret melalui pendirian dan pengelolaan madrasah serta pesantren khusus perempuan, baik di Haramain maupun di Indonesia. Pendekatan institusional ini menunjukkan bahwa Khairiyah Hasyim memandang pendidikan sebagai infrastruktur sosial yang memungkinkan perempuan memperoleh akses pengetahuan, otoritas pedagogis, dan ruang pembentukan identitas keagamaan secara sistematis. Pendidikan, dalam pandangannya, bukan sekadar sarana dakwah, melainkan mekanisme jangka panjang untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan Muslim melalui pembentukan kapasitas intelektual dan moral yang berkelanjutan. Secara biografis, Khairiyah Hasyim lahir pada tahun 1908 di Jombang sebagai putri KH. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan dikenal sebagai pengasuh Pondok Pesantren Putri Seblak Jombang serta pendiri Madrasah Kuttatul Banat di Makkah; kiprahnya di dua kawasan tersebut menjadikannya tokoh sentral dalam pembentukan tradisi pendidikan perempuan di lingkungan pesantren tradisional (Oga Satria, 2020)(Hsb & Hambali, R, 2023).

Konsep pendidikan yang dikembangkan Khairiyah Hasyim menekankan keseimbangan antara penguasaan ilmu-ilmu keislaman, pembentukan akhlak, dan penguatan kapasitas intelektual perempuan sebagai subjek pendidikan. Pendidikan tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai hak sosial perempuan yang harus dijamin melalui sistem pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan gender. Pandangan ini sejalan dengan gagasan keadilan gender dalam Islam sebagaimana dikemukakan oleh Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia, yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan prasyarat utama bagi partisipasi perempuan dalam ruang publik keagamaan dan sosial. Dari pemikiran Khairiyah Hasyim dapat dipahami bahwa pengalaman hidup, peran kepemimpinan pesantren, serta mobilitas intelektual Khairiyah Hasyim membentuk kerangka praksis pendidikannya yang berpijak pada tradisi pesantren namun terbuka pada transformasi sosial perempuan Muslim (Novalia, 2019).

### **3.4 Pendidikan Pesantren dan Perspektif Gender**

Pesantren Putri Seblak yang diasuh Khairiyah Hasyim merepresentasikan model pendidikan Islam yang sensitif gender dalam konteks tradisi pesantren Nusantara. Dalam sistem pendidikan ini, pemisahan ruang belajar (*banat*) antara laki-laki dan perempuan tidak dimaksudkan sebagai bentuk subordinasi atau pembatasan akses pengetahuan, melainkan sebagai strategi pedagogis yang dirancang untuk menciptakan ruang aman, kondusif, dan berdaya bagi perempuan. Pemisahan tersebut memungkinkan perempuan memperoleh

kesempatan belajar yang lebih optimal, bebas dari tekanan relasi kuasa berbasis gender yang kerap muncul dalam ruang pendidikan campuran. Dengan demikian, pesantren ini menyediakan ruang pembelajaran yang relatif otonom bagi perempuan dalam mengakses, mengolah, dan memproduksi pengetahuan keagamaan.

Dalam praktiknya, Pesantren Putri Seblak tidak hanya berfungsi sebagai lembaga transmisi tradisi keislaman, tetapi juga sebagai arena pembentukan otoritas keagamaan perempuan. Melalui kurikulum yang menekankan penguasaan kitab-kitab klasik, penguatan akhlak, serta pembiasaan praktik keagamaan, santri perempuan didorong untuk menjadi subjek aktif dalam proses pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren dapat menjadi ruang produksi pengetahuan keagamaan perempuan yang menantang asumsi bahwa otoritas keilmuan Islam hanya dimiliki oleh laki-laki (Muryanti, 2014). Dalam perspektif gender Islam, model pendidikan ini mencerminkan upaya dekonstruksi relasi kuasa patriarkal secara gradual melalui mekanisme pendidikan berbasis tradisi.

Selain aspek intelektual, pendidikan pesantren yang dikembangkan Khairiyah Hasyim juga menekankan pentingnya kemandirian perempuan, baik secara sosial maupun ekonomi. Pendidikan diarahkan untuk membekali perempuan dengan keterampilan hidup (*life skills*), etos kerja, dan kesadaran akan peran sosialnya di tengah masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa pendidikan pesantren tidak hanya mempersiapkan perempuan sebagai penjaga moral keluarga, tetapi juga sebagai individu yang memiliki kapasitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, pesantren berfungsi sebagai ruang transformasi sosial yang memungkinkan perempuan mengartikulasikan perannya secara lebih luas tanpa harus keluar dari kerangka nilai-nilai Islam (Husein, 2019).

Secara konseptual, model pendidikan pesantren yang dikembangkan Khairiyah Hasyim menunjukkan bahwa tradisi pesantren tidak bersifat statis dan anti terhadap gagasan keadilan gender. Sebaliknya, pesantren dapat menjadi medium negosiasi antara tradisi keagamaan dan tuntutan keadilan sosial, termasuk dalam isu gender (Muslich, 2013). Dalam konteks ini, pendidikan pesantren berperan sebagai strategi kultural untuk mewujudkan keadilan gender dalam Islam melalui pendekatan edukatif yang kontekstual, gradual, dan berakar pada nilai-nilai keislaman.

### **3.5 Perbandingan Ideologis dan Kontekstual Zainab al-Ghazali dan Khairiyah Hasyim**

Secara ideologis, Zainab al-Ghazali dan Khairiyah Hasyim sama-sama menempatkan pendidikan sebagai instrumen utama pemberdayaan perempuan Muslim. Keduanya berpijak pada keyakinan bahwa pendidikan merupakan medium strategis untuk membangun kesadaran keagamaan, kapasitas intelektual, dan peran sosial perempuan dalam masyarakat

Islam. Namun demikian, kesamaan tersebut berkembang dalam arah yang berbeda ketika dihadapkan pada konteks sosial, politik, dan kultural masing-masing tokoh. Perbedaan konteks inilah yang membentuk variasi pendekatan dan orientasi praksis pendidikan perempuan yang mereka kembangkan (Hamid et al., 2014). Zainab al-Ghazali beroperasi dalam konteks Mesir yang ditandai oleh dinamika politik, represi negara, dan menguatnya gerakan Islam sebagai respons terhadap sekularisme dan kolonialisme. Dalam konteks tersebut, pendidikan perempuan diarahkan pada pembentukan kader dakwah dan aktivis perempuan yang memiliki kesadaran ideologis, militansi moral, dan komitmen terhadap perjuangan Islam di ruang publik. Pendidikan berfungsi sebagai sarana mobilisasi sosial dan ideologis, di mana perempuan diposisikan sebagai agen perubahan yang berperan aktif dalam proyek Islamisasi masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan menurut Zainab bersifat politis-ideologis, berorientasi pada transformasi sosial melalui aktivisme keagamaan. (Herri, 2019)(Hamid & Wan Hasan, 2015)

Sebaliknya, Khairiyah Hasyim bergerak dalam konteks pesantren dan pendidikan Islam Nusantara yang relatif stabil secara politik, namun sarat dengan tantangan struktural terkait akses pendidikan bagi perempuan. Dalam konteks ini, pendidikan perempuan dikembangkan melalui pendekatan institusional dengan mendirikan dan mengelola madrasah serta pesantren khusus perempuan. Fokus utama Khairiyah Hasyim adalah membangun sistem pendidikan yang berkelanjutan sebagai basis peningkatan kapasitas intelektual, moral, dan sosial perempuan Muslim. Pendidikan tidak diarahkan pada mobilisasi politik, melainkan pada pembentukan otoritas pedagogis dan kemandirian perempuan dalam jangka Panjang (Hsb & Hambali, R, 2023).

Pendekatan yang ditempuh Khairiyah Hasyim dalam pengembangan pendidikan perempuan dapat dipahami sebagai strategi transformasi sosial jangka panjang yang berangkat dari realitas kultural dan struktural masyarakat Muslim Nusantara. Berbeda dengan gerakan perempuan yang lahir dari situasi konflik politik terbuka atau kolonialisme yang represif, Khairiyah Hasyim beroperasi dalam ruang sosial pesantren yang relatif stabil, namun tetap dibatasi oleh konstruksi patriarkal yang menempatkan perempuan pada ranah domestik. Tantangan utama yang dihadapi bukanlah represi politik langsung, melainkan keterbatasan akses, legitimasi, dan kesempatan pendidikan bagi perempuan dalam sistem keilmuan Islam tradisional (Fadhilah, 2022).

Dalam konteks tersebut, Khairiyah Hasyim memilih jalur institusional sebagai medium perubahan. Dengan mendirikan dan mengelola madrasah serta pesantren khusus perempuan, ia menciptakan ruang aman dan sah secara sosial-religius bagi perempuan untuk mengakses ilmu pengetahuan agama dan umum. Langkah ini penting karena pendidikan perempuan pada masa itu sering kali dipandang sekunder atau bahkan tidak perlu. Melalui



institusi pendidikan yang mapan, Khairiyah Hasyim tidak hanya membuka akses belajar, tetapi juga membangun struktur yang memungkinkan keberlanjutan proses pendidikan lintas generasi.

Fokus pendidikan yang dikembangkan tidak semata-mata pada transfer pengetahuan keagamaan, melainkan pada pembentukan kepribadian perempuan Muslim yang utuh, mencakup dimensi intelektual, moral, dan sosial. Perempuan didorong untuk memiliki kapasitas berpikir kritis, etos keilmuan, serta kesadaran sosial yang kuat, sehingga mampu berperan aktif dalam keluarga dan Masyarakat (Azizah et al., 2025). Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana pemberdayaan yang halus namun mendalam, karena bekerja melalui pembentukan habitus dan otoritas keilmuan, bukan melalui konfrontasi atau mobilisasi politik.

Lebih jauh, pendekatan Khairiyah Hasyim mencerminkan visi jangka panjang tentang kemandirian perempuan. Dengan menguasai ilmu dan memiliki legitimasi pedagogis, perempuan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada otoritas laki-laki dalam urusan pendidikan dan keagamaan. Mereka dipersiapkan untuk menjadi pendidik, pengelola lembaga, dan agen transmisi nilai-nilai Islam yang berakar pada tradisi pesantren. Dalam kerangka ini, perubahan sosial yang dihasilkan bersifat gradual namun berkelanjutan, karena ditopang oleh institusi dan sumber daya manusia yang terus direproduksi.

Dengan demikian, pendidikan perempuan menurut Khairiyah Hasyim dapat dipahami sebagai proyek sosial-kultural yang menekankan kesinambungan, stabilitas, dan penguatan kapasitas internal komunitas Muslim. Alih-alih menjadikan pendidikan sebagai alat mobilisasi politik jangka pendek, ia memosisikannya sebagai fondasi pembentukan otoritas perempuan dalam ruang keagamaan dan sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa transformasi peran perempuan tidak selalu harus ditempuh melalui jalur politik yang konfrontatif, tetapi dapat dilakukan melalui penguatan institusi pendidikan yang berakar kuat dalam tradisi dan kebutuhan masyarakat.

Perbedaan konteks tersebut menghasilkan model pemberdayaan yang berbeda pula. Zainab al-Ghazali menekankan otoritas moral dan ideologis perempuan di ruang publik, yang diperoleh melalui aktivisme dakwah dan keterlibatan dalam gerakan Islam. Sementara itu, Khairiyah Hasyim menekankan otoritas pedagogis dan institusional perempuan dalam ranah pendidikan Islam, yang diwujudkan melalui kepemimpinan dalam pesantren dan madrasah. Meskipun berbeda, kedua model ini saling melengkapi dalam menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam Islam tidak bersifat tunggal atau seragam, melainkan kontekstual, dinamis, dan dipengaruhi oleh struktur sosial serta tantangan yang dihadapi masing-masing masyarakat. Perbandingan antara Zainab al-Ghazali dan Khairiyah Hasyim memperlihatkan spektrum pemberdayaan perempuan dalam Islam, mulai dari pendekatan

ideologis-aktivis hingga pendekatan institusional-pedagogis. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan Islam dapat menjadi arena strategis bagi perempuan Muslim untuk membangun otoritas, baik di ruang publik maupun dalam institusi pendidikan, tanpa harus terjebak pada dikotomi antara tradisi dan perubahan sosial.

### **3.6 Implikasi bagi Studi Gender Islam Kontemporer**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam merupakan arena strategis bagi negosiasi dan rekonstruksi relasi gender dalam masyarakat Muslim. Melalui analisis terhadap pemikiran dan praksis pendidikan Zainab al-Ghazali dan Khairiyah Hasyim, studi ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dalam Islam tidak berlangsung dalam satu pola tunggal, melainkan melalui beragam strategi yang dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan kultural masing-masing. Pendidikan berfungsi tidak hanya sebagai medium transmisi pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai ruang produksi otoritas, identitas, dan agensi perempuan Muslim. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian feminisme Islam dengan menghadirkan dua model pemberdayaan perempuan yang berbeda namun saling melengkapi, yaitu model aktivisme ideologis dan model institusional pedagogis. Model pertama menekankan pembentukan kesadaran ideologis dan keterlibatan perempuan dalam ruang publik melalui dakwah dan gerakan sosial-keagamaan, sedangkan model kedua menekankan pembangunan institusi pendidikan sebagai basis penguatan kapasitas intelektual dan kemandirian perempuan dalam jangka panjang. Kedua model ini menunjukkan bahwa feminisme Islam tidak bersifat monolitik atau seragam, melainkan merupakan spektrum pemikiran dan praksis yang berakar pada nilai-nilai Islam serta realitas sosial yang dihadapi perempuan Muslim.

Lebih lanjut, implikasi studi ini menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dalam kajian gender Islam kontemporer. Alih-alih menilai pemberdayaan perempuan berdasarkan standar feminisme liberal universal, penelitian ini menunjukkan bahwa agensi perempuan Muslim perlu dibaca melalui kerangka nilai, tradisi, dan strategi lokal yang mereka kembangkan. Dengan demikian, kajian ini berkontribusi pada upaya dekonstruksi dikotomi antara tradisi Islam dan keadilan gender, serta membuka ruang bagi pengembangan wacana feminisme Islam yang lebih inklusif, kritis, dan kontekstual.

## **4. Kesimpulan**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran dan praktik pendidikan perempuan yang dikembangkan oleh Zainab al-Ghazali dan Khairiyah Hasyim melalui perspektif feminisme Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua tokoh sama-sama menempatkan pendidikan sebagai instrumen strategis pemberdayaan perempuan Muslim, namun mengembangkan pendekatan yang berbeda sesuai dengan konteks sosial, politik, dan

kultural masing-masing. Zainab al-Ghazali memosisikan pendidikan perempuan sebagai sarana pembentukan kesadaran ideologis dan aktivisme dakwah dalam konteks gerakan Islam di Mesir, sementara Khairiyah Hasyim mengembangkan pendidikan perempuan melalui pendekatan institusional yang berorientasi pada keberlanjutan melalui pesantren dan madrasah perempuan di Haramain dan Indonesia. Perbedaan pendekatan tersebut menghasilkan dua model pemberdayaan perempuan dalam pendidikan Islam. Zainab al-Ghazali menekankan pembentukan otoritas moral dan ideologis perempuan di ruang publik melalui aktivisme keagamaan, sedangkan Khairiyah Hasyim menekankan penguatan otoritas pedagogis dan institusional perempuan melalui pendidikan pesantren yang sensitif gender. Kedua model ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam Islam tidak bersifat tunggal atau seragam, melainkan kontekstual dan dipengaruhi oleh struktur sosial serta tantangan yang dihadapi perempuan Muslim di masing-masing wilayah.

Secara teoretis, artikel ini berkontribusi pada pengembangan kajian feminisme Islam dengan memperlihatkan bahwa agensi perempuan Muslim dapat diwujudkan melalui beragam strategi yang tetap berakar pada nilai-nilai Islam. Studi ini menegaskan bahwa feminisme Islam tidak identik dengan feminisme liberal, melainkan merupakan spektrum pemikiran dan praksis yang memungkinkan perempuan Muslim bernegosiasi dengan tradisi, otoritas keagamaan, dan struktur sosial secara kontekstual. Dengan demikian, penyebutan Zainab al-Ghazali dan Khairiyah Hasyim dalam kerangka feminisme Islam perlu dipahami secara kritis sebagai bentuk *Islamic agency*, bukan sebagai adopsi ideologis feminisme Barat secara utuh.

Refleksi gender Islam yang ditawarkan dalam artikel ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki potensi besar sebagai ruang transformasi relasi gender yang adil dan berkeadilan. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai transmisi pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai arena pembentukan otoritas, identitas, dan peran sosial perempuan Muslim. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan Islam yang inklusif dan sensitif gender menjadi agenda penting dalam merespons tantangan masyarakat Muslim kontemporer, tanpa harus melepaskan diri dari kerangka normativitas dan nilai-nilai keislaman.

## 5. Referensi

- Abidin, Z. (2017). Kesetaraan gender dan emansipasi perempuan dalam pendidikan Islam. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 12(1), 1–17.
- Adnan, A., & Ahmad, Z, N. (2009). *50 tokoh Islam yang mengubah dunia*. PTS Millenia.
- al-Ghazali, Z. (1994). *Ayyām min ḥayātī [Days from my life]*. Dar al-Tawzi' wa al-Nashr al-Islamiyyah.

- Azizah, S. Al, Irwan, I., Rahmah, S., Febrica, S., Siti, S., & Suarsih. (2025). Konsep Pendidikan Islam Bagi Perempuan Perspektif Nyai Khairiyah Hasyim Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Perempuan Di Masa Modern. *JIPKIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Keislaman*, 5(1), 71–84. <http://jipkis.stai-dq.org/index.php/home/article/view/151>
- Barlas, A. (2002). *Believing women in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Fadhilah, A. U. (2022). *PEMIKIRAN KHAIRIYAH HASYIM ASYARI TENTANG PENDIDIKAN PEREMPUAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN ISLAM*. UIN Raden Intan Lampung.
- Hamid, S., Ramli, F., & Yama, P. (2014). Sumbangan Zainab al-Ghazali dalam memartabatkan kedudukan wanita dalam arena kepemimpinan umat Islam. In *Proceedings of the International Conference on Postgraduate Research*, 1–12.
- Hamid, S., & Wan Hasan, R. (2015). Zainab al-Ghazali al-Jubaily dan tafsir Nazarāt fī Kitābillāh: Satu sorotan. In *International Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization*, 598–607.
- Hanapi, A. (2015). Peran Perempuan dalam Islam. *Jurnal Studi Islam*, 1(1), 1–12.
- Herri, A. (2019). *Zainab al-Ghazali: Tokoh reformis Islam di Mesir (1917–2005)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Hsb, S. ., & Hambali, R. (2023). Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam di Indonesia (Perspektif Nyai Siti Walidah dan Nyai Khairiyah Hasyim). *Gunung Djati Conference Series*, 779–794.
- Husein, M. (2019). *Islam agama ramah perempuan: Pembelaan kiai pesantren*. LKiS, IRCiSoD.
- Ibrahim, O. U. (2011). A re-reading of the Egyptian Zaynab al-Ghazzali, the Muslim Brotherhood and the Islamic feminist movement in contemporary society. *International Journal of Sociology and Anthropology*, 3(11), 407–415.
- Kurniawati, F. (2023). *Konsep pendidikan Islam bagi perempuan perspektif Nyai Khairiyah Hasyim dan relevansinya dalam pendidikan perempuan di masa modern*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Muryanti. (2014). Perubahan pemaknaan peran perempuan Muslim dalam pengasuhan anak di pedesaan kawasan Prambanan. *Kontekstualita*, 29(2), 205–224.
- Muslich, M. (2013). *Pendidikan karakter menjawab tantangan krisis multidimensional*. Bumi Aksara.
- Novalia. (2019). Ulama perempuan dan dedikasinya dalam pendidikan Islam: Studi pemikiran Nyai Khairiyah Hasyim (1908–1983). *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 121–160.
- Oga Satria. (2020). Partisipasi Ulama Perempuan Dalam Penyebaran Islam Di Nusantara Melalui Pendidikan. *The International Journal of Pegon:: Islam Nusantara Civilization*, 3(2), 131–160. <https://ejournalpegon.jaringansantri.com/index.php/INC/article/view/24>
- Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Alfabeta.

Sukmadinata. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Graha Aksara.

Tanjung, N., Rahman, Y., & Ikhwan, M. (2021). Penafsiran nusyūz dalam tafsir Nazarāt fī Kitābillāh. Al-Furqan. *Jurnal Ilmiah Al-Furqan*, 6(2), 112–125.

Wadud, A. (2006). *Qur'an Menurut Perempuan : Meluruskan bias Gender dalam tradisi tafsir*. Serambi Ilmu Semesta.